

SKRIPSI

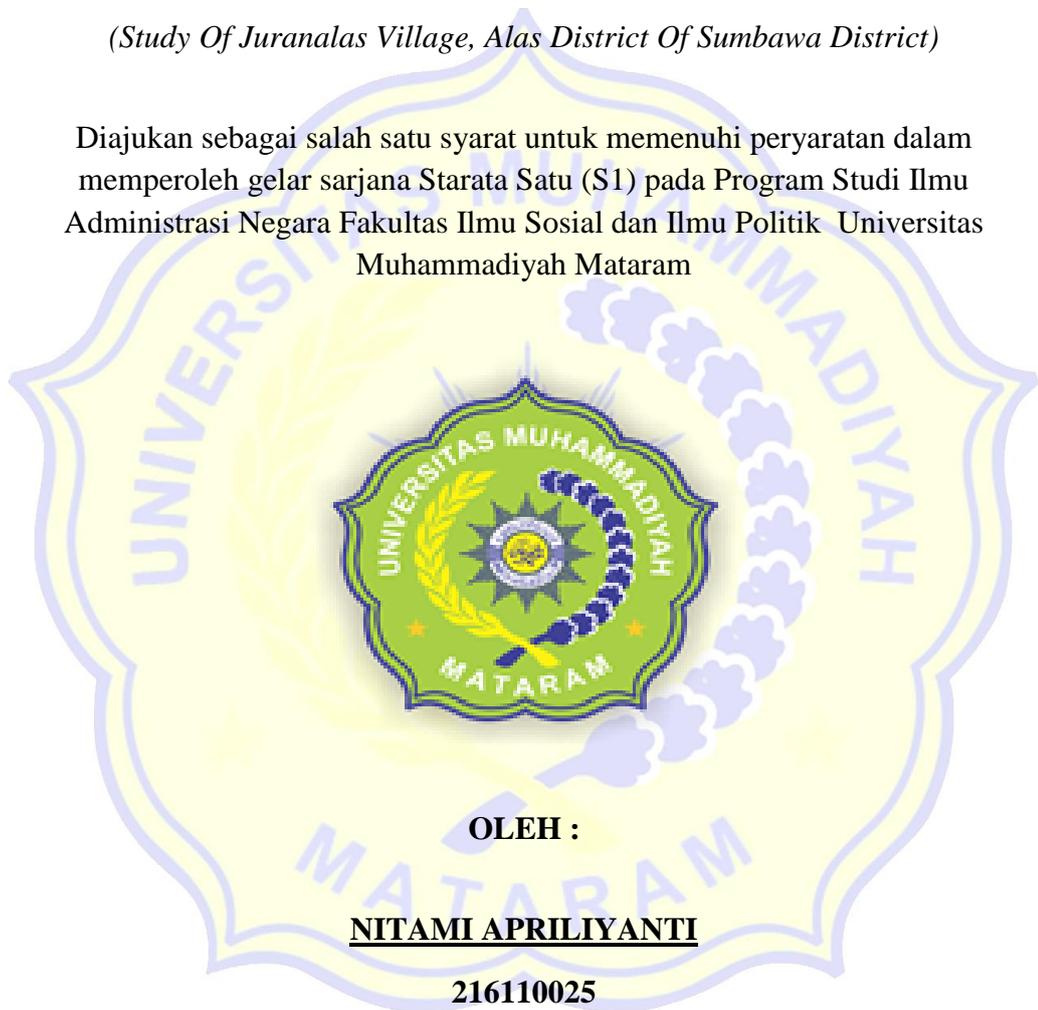
**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESADALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(STUDI DESA JURANALAS KECAMATAN ALAS KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2019)**

Effectvitas Of Utilizing Village Funds In Implementasi Village Development

(Study Of Juranalas Village, Alas District Of Sumbawa District)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

NITAMI APRILYANTI

216110025

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KOSENTERASI KEBIJKAN PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian

Skripsi Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Agustus 2020

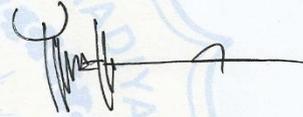
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(Dr. Mintasrihardi, M.H)
NIDN. 08530016101

Dosen Pembimbing II



(Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP)
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Program Studi Administrasi Publik
Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI KASUS KREDIT SAHABAT (KRABAT) DESA LABUAN MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA TANUN 2017-2018)

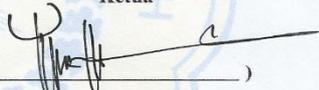
Oleh :
RENA MAULIDIANA
NIM. 216110031
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.
Mataram, 15 Agustus 2020
Tim Penguji

1. **Drs. Mintasrihardi, M.H**
NIDN. 08530016101

()
Ketua

2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN. 0827118801

()
Anggota

3. **Dedy Iswanto, ST., MM**
NIDN. 0818087901

()
Anggota

Mengetahui



Ekonomi Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

()
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NITAMI APRILIYANTI

NIM : 2161100325

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
NITAMI APRILIYANTI
NIM. 216110025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NITAMI APRILIYANTI
NIM : 216110025
Tempat/Tgl Lahir : ALAS, 02 APRIL 1998
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087 849 185 305

Judul Penelitian :-

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESA JURANALAS KECAMATAN ALAS
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37 96

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 28 - 08 - 2020

Penuhs



NITAMI APRILIYANTI
NIM. 216110025

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NITAMI APRILIYANTI
NIM : 216110025
Tempat/Tgl Lahir : ALAS, 02 APRIL 1998
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087.849.185.305
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Juran Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 28-08-2020

Penulis



NITAMI APRILIYANTI
NIM. 216110025

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pernah membandingkan kemampuan diri sendiri dengan pencapaian keberhasilan orang lain, karena setiap orang mempunyai proses perjalanan yang berbeda-beda agar kalian bisa belajar bersyukur dan menikmati setiap prosesnya”.

(Nitapril/Penulis)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya **Bapak Drs. A. Rahman Fattah** dan **Ibunda Nurmi S.Pd** yang selalu memberikan do'a dan menjadi motivator serta menjadi penyemangat luar biasa selama penyusunan tugas akhir.
2. Kakak saya **Lisaomi Lestary A.Md, Farm** yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Terimakasih kepada Kakak **Susiana, S.IP** yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan tugas akhir.
4. Terimakasih kepada sahabat saya "**Rena Maulidiana dan Wirda Febi Sinarti**" yang selalu menghibur disaat lelah dengan penyusunan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 untuk pengalaman dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Studi Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H.M. Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Drs. Mintasrihardi, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi.
5. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan tanpa lelah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Faryan Moslem yang dengan setia memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

7. Rena Maulidiana, Wirda Febi Sinarti, Lalu Muhammad Farozi dan Abdul Majid selaku teman seperjuangan sekaligus sahabat di tanah rantauan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun skripsi, peneliti sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Agustus 2020

Penulis,

NITAMI APRILIYANTI
216110025

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

**(STUDI DESA JURANALAS KECAMATAN ALAS KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2019)**

Oleh:

Nitami Apriliyanti

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

Skripsi, Agustus 2020 Email: aprilnita202@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai upaya pelaksanaan pembangunan didesa untuk mensukseskan pembangunan Nasional, maka setiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Salah satunya adalah Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa melalui pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan juga menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Juranalas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara umum efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Juranalas belum mampu dikatakan efektif hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi pembangunan seperti masih terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dilingkungan Desa Juranalas serta dari aspek efektivitas belum adanya pemanfaatan teknologi yang diberikan kepada masyarakat baik teknologi tepat guna ataupun lainnya serta efektivitas dari masih kurangnya kemantapan kerja karyawan atau perangkat Desa.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

**THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND UTILIZATION ON THE
VILLAGE DEVELOPMENT (STUDY OF JURANALAS VILLAGE, ALAS
DISTRICT, SUMBAWA 2019)**

By :

Nitami Apriliyanti

Public Administration Study Program

Faculty of Social and Political Sciences

Muhammadiyah University of Mataram

Thesis, August 2020

Email: aprilnita202@gmail.com

ABSTRACT

Each village gets a Village Fund from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), as an effort to implement the villages development to support national establishment. It is transferred through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), which is used to finance governance, community development, empowerment community and the development action. One of them is Juranalas Village, Alas District, Sumbawa Regency, the use of Village Funds in implementing physical and non-physical village to improve the welfare of village communities. This study aims to observe the effectiveness of using village funds un the village development and also to analyze the factors that affect the effectiveness of the use of village funds in Juranalas Village. The method used in this research is descriptive qualitative, the data collection techniques were obtained through interviews, observation and documentation. Based on the study, it shows that the effectiveness of using village funds in Juranalas Village has not sufficient yet. It is because there are factors that affect the establishment, such as environmental damage occurs in the Juranalas Village environment and the aspect of utilizing technology ineffectively, that will be provided to the community, both applied technology or others. Otherwise, the lack of job stability of employees or Village officials also is one of the supporting problems.

Keywords: Effectiveness, Village Fund, Development

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

xi

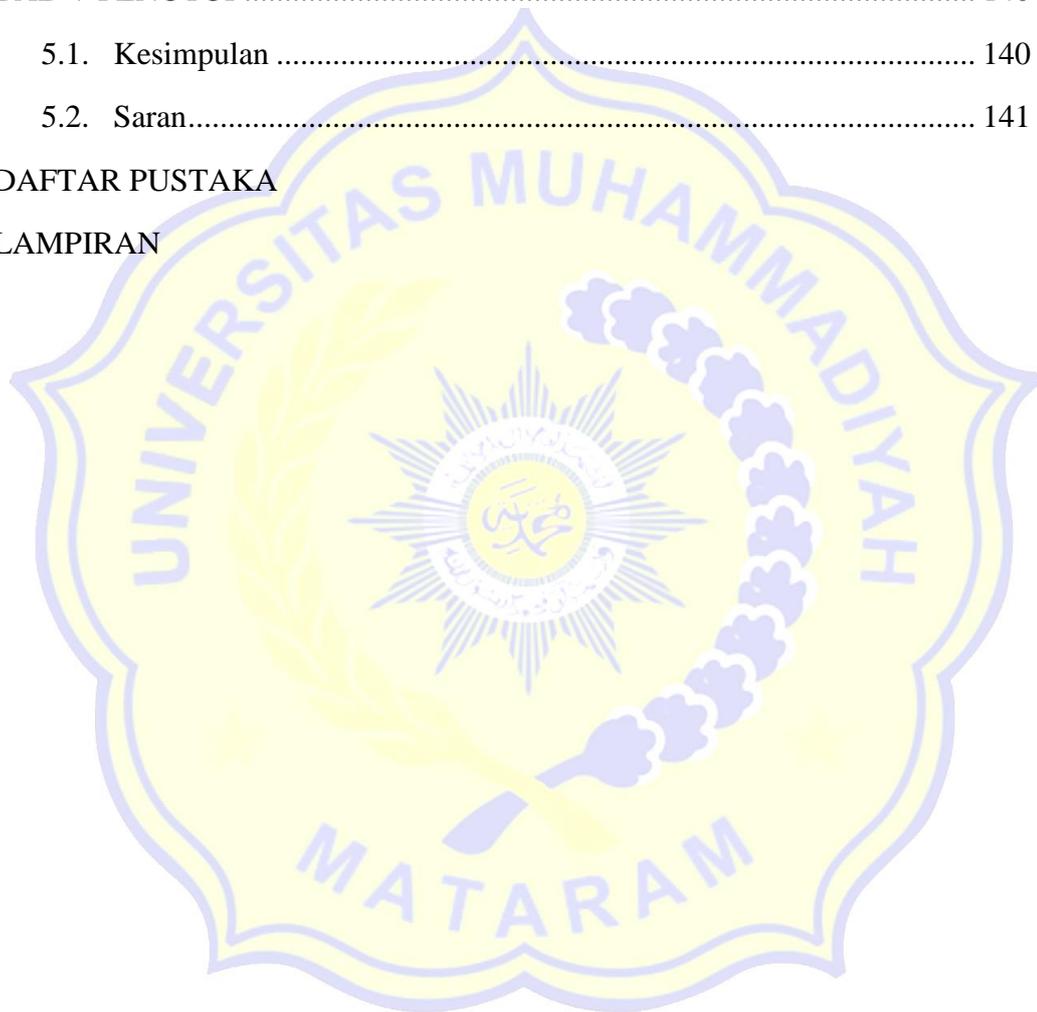
DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PLAGIASI.....	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Efektivitas	14
2.2.1.1. Definisi Efektivitas.....	14
2.2.1.2. Konsep Efektivitas	15
2.2.1.3. Kriteria Efektivitas	16
2.2.1.4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	17
2.2.1.5. Aspek-Aspek Efektivitas.....	18
2.2.1.6. Variabel Efektivitas.....	19

2.2.1.7. Indikator Efektivitas.....	20
2.2.2. Pembangunan	22
2.2.2.1. Definisi Pembangunan	22
2.2.2.2. Unsur-Unsur Pembangunan	23
2.2.2.3. Tipe-Tipe Pembangunan	24
2.2.2.4. Konsep Pembangunan.....	25
2.2.2.5. Prgeseran Paradigma Pembangunan	28
2.2.2.6. Studi Pendekatan Pembangunan	34
2.2.2.7. Indikator Pembangunan	36
2.2.3. Dana Desa	37
2.2.3.1. Definisi Dana Desa	37
2.2.3.2. Tujuan Dana Desa.....	38
2.2.3.3. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	38
2.2.3.4. Penetapan Prioroitas Dana Desa	39
2.2.3.5. Mekanisme Penetapan Dana Desa	42
2.2.4. Desa.....	44
2.2.4.1. Definisi Desa.....	44
2.2.4.2. Unsur-Unsur Desa.....	46
2.2.4.3. Klasifikasi Desa	46
2.3. Kerangka Berfikir.....	51
2.3.1. Definisi Konseptual.....	51
2.3.2. Definisi Operasional.....	52
BAB III METODEDE PENELITIAN.....	54
3.1. Metode Penelitian.....	54
3.2. Lokasi Penelitian.....	54
3.3. Fokus Penelitian	55
3.4. Tehnik Penentu Informan.....	55

3.5. Jenis Dan Sumber Data	56
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
3.7. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	60
4.1.1. Desa Jurunalas.....	60
4.2. Aspek Pembanunan.....	65
4.2.1. Kekayaan Rata-Rata.....	65
4.2.1.1. Produktivitas Masyarakat.....	67
4.2.1.1. Pendapatan Masyarakat.....	73
4.2.2. Pemerataan	75
4.2.2.1. Kesejahteraan	79
4.2.2.2. Kemakmuran	84
4.2.3. Kualitas Hidup	88
4.2.3.1. Rata-Rata Jumlah Kematian Bayi	92
4.2.3.2. Presentasi Buta dan Melek Huruf	98
4.2.4. Kerusakan lingkungan.....	101
4.2.4.1. Penggunaan Sumber Daya Alam	104
4.2.4.2. Dampak Terhadap Lingkungan	106
4.2.5. Keadilan Sosial Dan Kesenambungan.....	108
4.2.5.1. Kesenjangan Sosial	109
4.2.5.2. Pelestarian Lingkungan.....	115
4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	117
4.3.1. Sifat Organisasi	117
4.3.1.1. Struktur Organisasi	120
4.3.1.2. Teknologi	123
4.3.2. Sifat Karyawan.....	125

4.3.2.1. Keterkaitan Pada Organisasi	126
4.3.2.2. Kemantapan Kerja.....	130
4.3.3. Kebijakan Dan Praktek Manejerial	132
4.3.3.1. Penyusunan Tujuan Strategis	133
4.3.3.2. Inovasi Dan Adaptasi	137
BAB V PENUTUP.....	140
5.1. Kesimpulan	140
5.2. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1.1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	61
Tabel 4.1.1.a	Jumlah Penduduk Desa Jurunalas	62
Tabel 4.1.1.b	Tingkat Pendidikan Desa Jurunalas	63
Tabel 4.1.1.c	Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Jurunalas.....	64
Tabel 4.2.1	Jumlah Keluarga Kepemilikan Lahan Desa Jurunalas.....	66
Tabel 4.2.1.1	Hasil Produktivitas Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2019	68
Tabel 4.2.1.1.a	Jumlah Penerima Program Bantuan Krabat Desa Jurunalas Tahun 2019	71
Tabel 4.2.1.1.b	Verifikasi Bantuan Krabat.....	72
Tabel 4.2.1.2	Jumlah Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Pertanian Desa Jurunalas Tahun 2018 Dan 2019.....	75
Tabel 4.2.2	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dana Desa Jurunalas Tahun 2019.....	77
Tabel 4.2.2.1	Jumlah Sasaran Bantuan Program Dana Desa Jurunalas Tahun 2019.....	81
Tabel 4.2.2.1.a	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2018 Dan 2019	81
Tabel 4.2.2.1.b	Verifikasi Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Dan Anggaran Biaya Tahun 2019	83
Tabel 4.2.2.2	Jumlah Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2019	86
Tabel 4.2.2.2.a	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2018 Dan 2019	87
Tabel 4.2.3	Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2018 Dan 2019	91
Tabel 4.2.3.1	Tingkat Kualitas Kesehatan Bayi Di Desa Jurunalas Tahun 2019.....	93
Tabel 4.2.3.1.a	Lembaga Kesehatan Desa Jurunalas	95
Tabel 4.2.3.1.b	Verifikasi Pembelian Barang Dan Peralatan Posyandu Desa Jurunalas Tahun 2019	97

Tabel 4.2.3.2	Tingkat Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2019.....	99
Tabel 4.2.3.2	Lembaga Pendidikan Desa Jurunalas Tahun 2019	102
Tabel 4.2.4	Sarana Dan Prasarana Kebersihan Desa Jurunalas Tahun 2019	102
Tabel 4.2.4.1	Jenis Penggunaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Jurunalas Tahun 2019	105
Tabel 4.2.4.2	Kualitas Air Sungai Desa Jurunalas Tahun 2019.....	107
Tabel 4.2.5.1	Jumlah Penerima Bantuan Industri Kecil Atau Industri Rumahan Desa Jurunalas Tahun 2019	111
Tabel 4.2.5.1.a	Verifikasi Bantuan Industri Kecil Atau Rumahan Dan Anggaran Biaya Desa Jurunalas Tahun 2019	113
Tabel 4.2.5.2	Verifikasi Pembangunan Talut Jalan Otak Desa Jurunalas Tahun 2019	116
Tabel 4.3.1	Dasar Huku Pembentukan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Jurunalas	119
Tabel 4.3.2.1	Keterkaitan Aparat Desa Dalam Organisasi	128



DAFTAR GAMBAR

2.4.	Kerangka Berfikir Peneliti.....	51
4.3.1.1.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Juranalas.....	122
4.3.3.1.	Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Juranalas....	135



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan bentuk kesatuan dari Negara Indonesia, yang dimana keberadaan Desa diakui secara Yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, Desa mempunyai peran penting dalam menunjang suatu pembangunan di sebuah Daerah ataupun Negara, dimana Desa sebagai bagian terkecil dari proses Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, dimana Desa memiliki peran penting dalam mensukseskan Pembangunan Nasional di suatu Negara, maka pembangunan Desa harus bisa menyeimbangi pembangunan di Kota-Kota. Akan tetapi, Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia masih dihadapkan oleh masalah pokok pembangunan seperti adanya ketidakseimbangan antara Pembangunan Kota dengan Desa. Ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia sendiri tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Dimana kemiskinan bukan lagi permasalahan yang baru dihadapi oleh Negara Indonesia, Kemiskinan merupakan penyakit disetiap Negara, baik di Negara berkembang ataupun di Negara Maju. Yang dimana kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi. Menurut Frank Ellis kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. (dalam tulisan Hasanah,2019:15)

Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi melihat persebaran wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya Pemerintah Pusat tidak bisa mengatur sendiri permasalahan yang terjadi di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 atau penetapan Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan di Daerahnya. (Hastin,2019:154)

Salah satu bentuk wewenang Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayahnya adalah dengan melaksanakan pembangunan yang merata, baik antar Kota ataupun Pedesaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan di Desa, maka pada tahun 2015 dimana Desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa atau Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) yang dimana Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Dimana nantinya Dana Desa tersebut

bisa dikelola secara tepat atau secara efektif oleh Pemerintah Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan Desa.(Fahri, 2017:75)

Melihat permasalahan pembangunan yang terjadi, tidak terkecuali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawang juga terus berupaya dalam melaksanakan pembangunan di Kota ataupun di Daerah Pedesaan. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten dari 10 Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa memiliki 24 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 157 Desa. (id.m.wikipedia.org) diakses pada pukul 23.45 pada tanggal 14 November 2019)

Persebaran penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahunnya, dilihat dari tahun 2014-2015 jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan penduduk sebanyak 12.160 jiwa. Pada tahun 2017 peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebanyak 449.680 jiwa. (sumbawakab.bps.go.id) diakses pada pukul 23.56 pada tanggal 14 November 2019).

Dengan peningkatan jumlah penduduk yang meningkat, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, baik itu masalah pembangunan infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan dan masalah kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 mencapai 68,69 ribu jiwa. Angka ini turun menjadi 2.97 jiwa atau 0,8% dari tahun sebelumnya 2016 sebesar 71,66 ribu jiwa, tapi penurunan tersebut masih jauh

dengan target Pemerintah Daerah sebesar 2%. (kabarsumbawa.com) diakses pukul 00.45 pada tanggal 14 November 2019).

Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Dimana pada tahun 2019 Dana Desa yang tersalur di Kabupaten Sumbawa jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi dasar yang diterima masing-masing Desa, selain itu ada kenaikan pada pendapatan Negara, dimana sebelumnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa Rp 60 Triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 70 Triliun. Dari 157 Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, terdapat 14 desa yang menerima Dana Desa Afirmasi, ke 14 desa yang mendapatkan Dana Desa Afirmasi tersebut terdiri dari Desa Emang Lestari, Desa Mata, Desa Usar, Desa Marente, Desa Pulau Bungin, Desa Labuan Bajo, Desa Sepayung, Desa Bao Desa, Desa Setoe Berang, Desa Labuan Aji, Desa Tepal, Desa Batu Rotok dan desa Pukat. Desa yang mendapatkan jatah alokasi afirmasi ini merupakan desa yang klasifikasi IDM (Indeks Desa Membangun) tertinggal dengan jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya masih rendah dengan jumlah yang besar dan juga dengan persoalan indeks geografisnya. (pulausumbawanews.net) diakses pada pukul 00.59 pada tanggal 14 November 2019).

Dengan melihat permasalahan Desa dengankategori Desa tertinggal yang ada di Kabupaten Sumbawa, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya terfokus pada pembangunan Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi tersebut. Dimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus berupaya mengatasi

permasalahan pembangunan di Desa yang memang sudah membangun dengan memberikan bantuan Dana Desa. Salah satunya di Desa Juranalas, yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki 4 Dusun dan 31 Rt serta 12 Rw, dengan luas 3.045Ha. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 5.033 jiwa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian yang beragam, yaitu sebagai petani, tukang ojek, tukang kayu, wiraswata, Pegawai Negeri, TNI dan karyawan swasta dan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 332 KK. (p2kpsbw.wordpress.com) diakses pada pukul 1 desember 2019 pukul 22.15)

Pada tahun sebelumnya yaitu 2017, pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Juranalas dialokasikan untuk pembangunan fisik dan non fisik, yang dimana dana desa dialokasikan ke pembangunan fisik sebesar 70% dan pembangunan non fisik sebesar 30%, yang dalam pelaksanaannya hampir rampung. Program yang dilaksanakan dalam pengalokasian dana desa yaitu seperti pembangunan trotoar, pembelian bak sampah, pembelian besi drill dan perbaikan talut dimasing-masing Dusun, pembuatan usaha jalan tani, perbaikan jalan Desa dan pengembangan gedung posyandu. (postkotantb.com) diakses pada pukul 12.54 tanggal 03 desember 2019)

Dengan informasi yang didapatkan penulis, dimana pemanfaatan dana desa di Desa Juranalas pada tahun sebelumnya dialokasikan ke beberapa perbaikan seperti pembangunan fisik ataupun nonfisik, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Juranalas pada tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah efektivitas pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Juranalas Tahun 2019 ?
- 1.2.2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Juranalas tahun 2019 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Juranalas tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Juranals tahun 2019.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi peneliti yang lain untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di Desa Juranalas.

1.3.2.1. Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

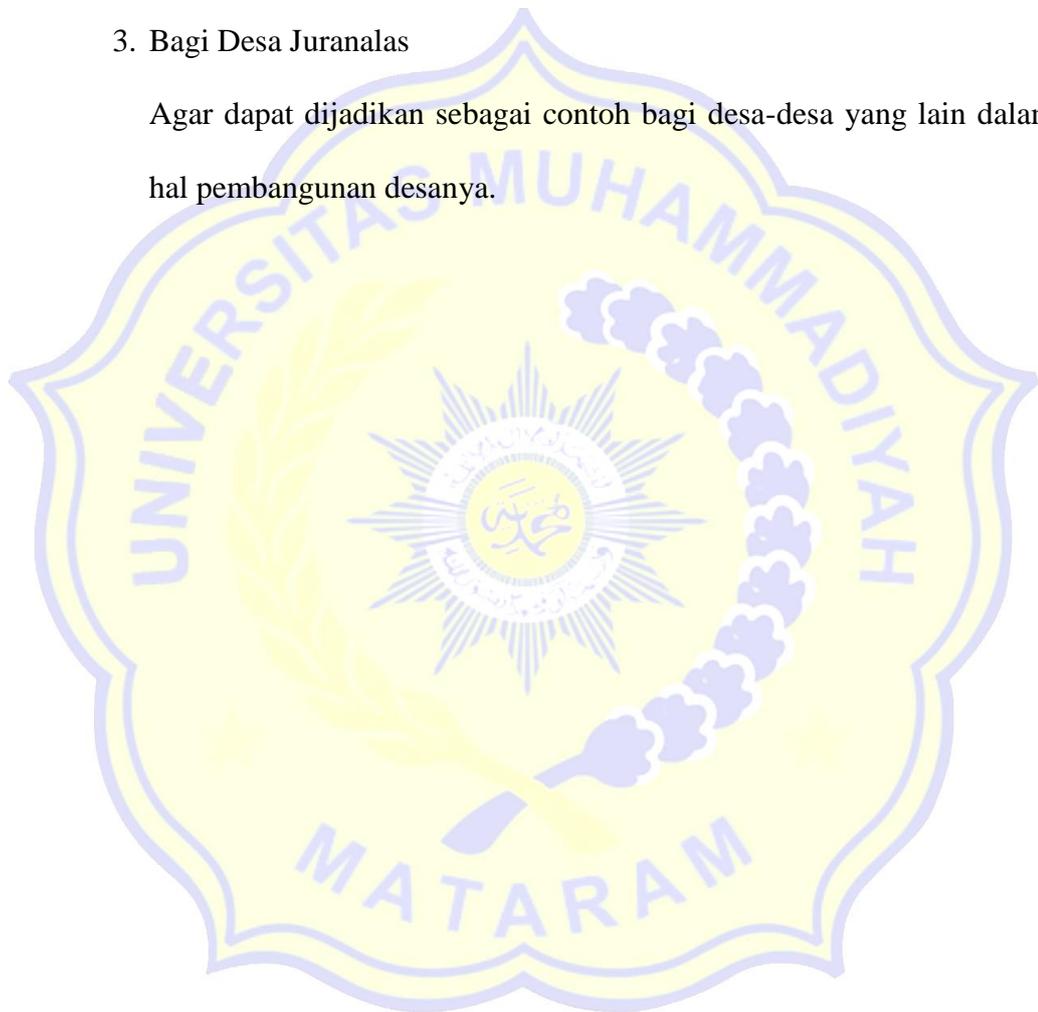
Dapat mengarahkan masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

2. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan desa seefektif mungkin.

3. Bagi Desa Juranalas

Agar dapat dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa yang lain dalam hal pembangunan desanya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Nova Sulastri, 2016 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watupute Kabupaten Muna”, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Lakopodo tentang efektivitas pengelolaan ADDnya masih kurang efektif, dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa itu sendiri. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama ingin mengetahui tentang tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Endang Juliana 2018 dengan judulnya “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan peneliti survei. Hasil penelitian yang dilakukan dimana tingkat efektivitas dalam pemanfaatan dana desanya belum sepenuhnya efektif, dikarenakan dimana dampak dari pemerataan pendapatan belum dirasakan oleh masyarakatnya.

Relevansi antara peneliti yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang efektivitas dari dana desa dalam pembangunan desa.

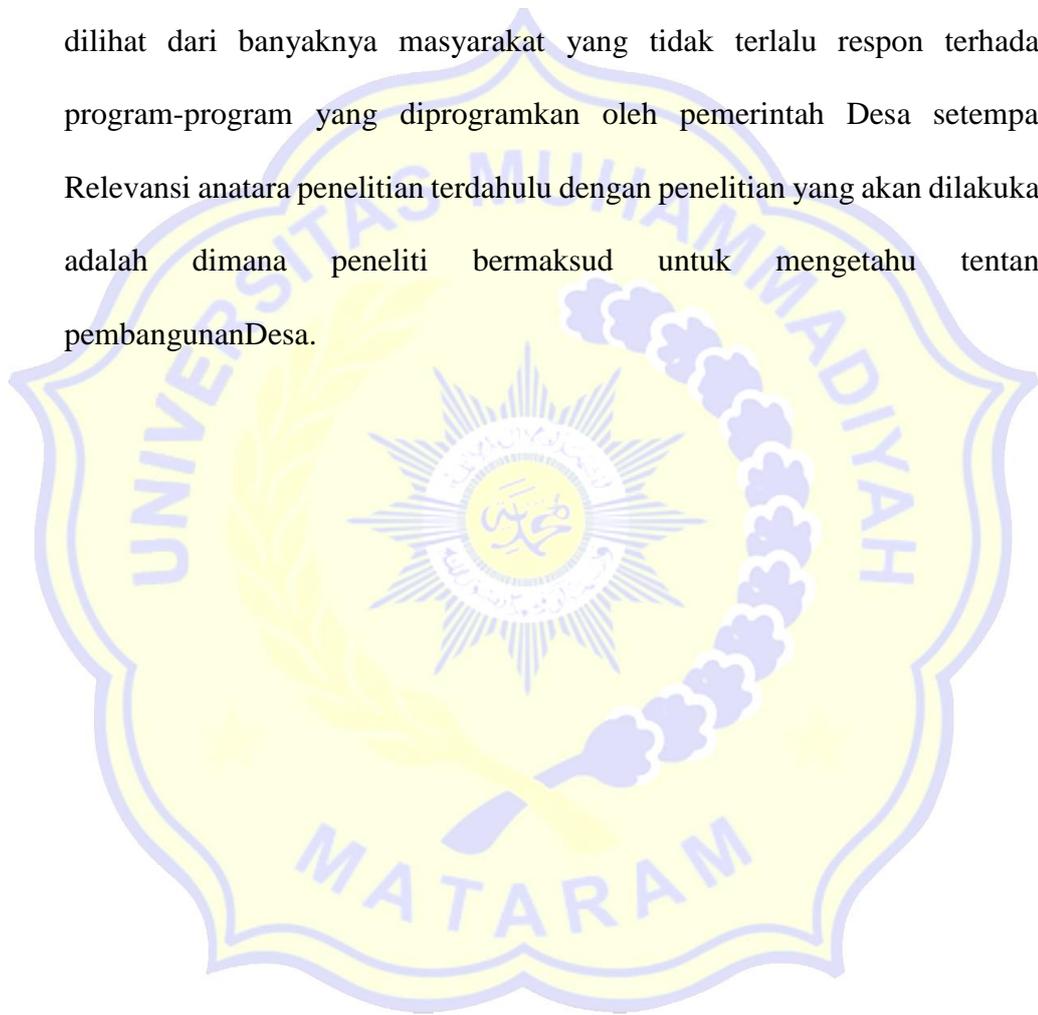
3. Andi Siti Sri Hutami (2017) judul penelitiannya “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan masih belum optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini dikarenakan proses pelaporan dan pertanggung jawaban mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya, serta tidak adanya pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa mengevaluasi hasil kinerja pemerintah.

Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana untuk desa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

4. Muhammad Daud (2017) yang berjudul “Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh”, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu anggaran desa dikelola dengan baik dan secara transparan, pembangunan infrastruktur yang merata dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Relevansi antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan ialah sama-sama meneliti anggaran desa dalam hal pembangunan desa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

5. Inta Demanik dan M.E. Tahitu, 2017 dengan judul “ Studi Tingkat Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi kasus: Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Hasil dari penelitian ini ialah dimana respon atau partisipasi masyarakat desa Layeni belum berpartisipasi secara keseluruhan, dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak terlalu respon terhadap program-program yang diprogramkan oleh pemerintah Desa setempat. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui tentang pembangunan Desa.



Tabel 2.1.

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Critical Point
1	Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan watupute Kabupaten Muna.	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	Masih kurangnya efektif dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Lakapodo tersebut, dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa.	Meneliti tentang pembnaganan desa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Tidak terdapatnya definisi konseptual dan definisi operasional yang dipaparkan jelas dalam kerangka berfikir
2.	Ending Juliana (2017)	Efektivitas Pemanfaatan dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian survei.	Dimana pemanfaatan dana desanya belum efektif, karena pemerataan pendapatan desa masih belum	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan	Dalam tinjauan pustaka tidak dijelaskan pembangunan

		Pelaksanaan Pedesaan di Kabupaten Asahan.		memberikan dampak kepada masyarakat desa.	ialah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa.	
3.	Andi siti Sri Hutami (2017)	Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.	penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Dimana hasil penelitian ini menunjukkan belum optimal dalam pengelolaan dana desanya, dikarenakan adanya proses pelaporan dan tanggung jawab yang mengalami keterlambatan, sehingga berdampak pada terlambatnya pencairan dana desa ke tahap berikutnya, dan tidak adanya	Sama-sama meneliti tentang dana desa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Tidak dijabarkan Kajian Pustaka, yang menjelaskan konsep variable yang ingin diteliti.

				pertanggung jawaban penggunaan ADD kepada masyarakat.		
4	Muhammad Daud (2017)	Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh	Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini dimana implementasi anggaran desa dikelola dengan baik dan secara transparan, pembangunan infrastruktur yang merata dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.	Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama meneliti tentang pembangunan desa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Metode penelitian tidak dijabarkan secara jelas.

5.	Inta Demanik dan M.E. Tahittu (2017)	Studi Tingkat Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus: Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatis pendekatan survey	Dimana respon atau partisipasi masyarakat Desa Layeni belum berpartisipasi secara keseluruhan, dimana banyaknya masyarakat yang tidak terlalu respon terhadap program-program yang diprogramkan oleh pemerintah Desa.	Relevansi antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan Desa.	Tidak dijabarkannya tinjauan pustaka.
----	--------------------------------------	---	--	---	---	---------------------------------------

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektivitas

2.2.1.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dalam keberhasilan mencapai tujuan, dimana efektivitas mengandung pengertian berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar diartikan semakin besar pula efektivitas dari tujuan yang diharapkan oleh organisasi. (dalam Rahmawati,2017:111)

Secara terminologis, efektivitas berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, atau dengan kata lain dapat juga dipahami sebagai tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan, dimana hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Hartati,2018:115)

Menurut F. Drucker dalam Scoderbeg (Sugiyono,2003:16) dalam Aziz, 2016:41) menyatakan bahwa “*Effectiveness is the foundation of success and effectiveness is doing the right things*”, yang dimana artinya bahwa efektivitas merupakan landasan untuk mencapai kesuksesan dan dengan pekerjaan yang memang betul dikerjakan.

Adapun pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam Rahmawati,2017:112) dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan

efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Hal tersebut menekankan bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa tekanan yang berasal dari anggota organisasi.

Menurut M. Syarif dan S.M. Richard (dalam Amaral,2019:115) bahwa dimana setiap bentukan organisasi pasti memiliki sebuah tujuan, dalam hal pencapaian tujuan tentu ada yang tercapai, lambat, cepat atau malah tidak mencapai tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu penilaian atas usaha pencapaian tujuan merupakan penilaian efektivitas.

2.2.1.2. Konsep Efektivitas

Menurut Gibson (dalam Aziz,2016:41) mengemukakan 2 pendekatan konsep efektivitas, yaitu :

- 1 Pendekatan Tujuan, yang didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah kesatuan yang rasional dan mempunyai tujuan yang mengandung misi, tujuan dan sasaran yang khas. Oleh karena itu, seberapa baik organisasi tersebut berfungsi, atau seberapa efektif organisasi tersebut dihitung dengan ukuran bagaimana keberhasilannya untuk mencapai tujuannya.
- 2 Pendekatan Sistem, yang memandang bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang kehadirannya merupakan bagian dari suatu lingkungan yang lebih

luas dan agar terus hidup organisasi tersebut harus berfungsi memuaskan dari lingkungannya.

Disisi lain adapun konsep efektivitas menurut Sinungan (2000:14) dalam Aziz,2016:41) yaitu :

- 1 Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara teori organisasi modern maupun klasik tentang output dan input.
- 2 Efektivitas dianggap sebagai perbandingan antara tingkatannya, dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai.
- 3 Efektivitas eksternal atau perbandingan antara suatu unit output dan evaluasi satu unit input.
- 4 Efektivitas adalah kemampuan sistem yang tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

2.2.1.3. Kriteria Efektivitas

Menurut Gibson (dalam tulisan Aziz,2016:198) terdapat kriteria dari efektivitas, yaitu :

1. Kriteria Produksi, kriteria ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.
2. Kriteria Efisiensi, dimana kriteria ini melakukan perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka dalam organisasi.
3. Kriteria Kepuasan, kriteria ini mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

4. Kriteria Keadaptasian, yaitu kriteria ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Kriteria Pengembangan, dimana kriteria ini untuk mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap lingkungan.

2.2.1.4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Selain itu terdapat 4 (empat) kategori yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers (dalam tulisan Aziz,2016:198) yakni :

1. Sifat Organisasi, terdiri dari struktur organisasi dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, yang merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian. Sedangkan teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
2. Sifat Lingkungan, sifat ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi seperti kondisi ekonomi.
3. Sifat Karyawan, yang berhubungan dengan peranan dan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi perbedaan sifat pekerja ini yang sedang

menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap efektivitas organisasi.

4. Kebijakan dan Praktek Manajerial, karena manejer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan mempelancar kegiatan yang ditujuankan kea rah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut haruslah jelas yang membawa kita kea rah tujuan yang diinginkan. Dari faktor kebijakan dan praktek manejrial ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam aspek yang menyumbang efektivitas yaitu : (a) penyusunan tujuan strategis, (b) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, (c) menciptakan lingkungan prestasi, (d) proses komunikasi, (e) kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan (f) inovasi dan adaptasi.

2.2.1.5. Aspek-Aspek Ektivitas

Adapun aspek-aspek efektivitas menurut pendapat Sujud (dalam Seumiyati,2017:42) yaitu :

1. Aspek Tugas dan Fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Aspek Rencana Program, yang dimaksud dengan program disini adalah rencana penelitian yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana akan efektif.
3. Aspek Kesatuan dan Aturan, aspek ini mencakup aturan yang baik jika aturan ini dilaksanakan sengan baik berarti ketentuan atau aturan yang berlaku secara efektif.

4. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal, aspek ini dikatakan efektif jika dilaksanakan dengan tujuan dan kondisi ideal yang baik maka akan efektif.

2.2.1.6. Variable Efektivitas

Menurut Budiani (2007:53) dalam Rahmawati,2017:112) terdapat empat variabel untuk melihat efektivitas suatu program, yaitu :

- 1 Ketepatan Sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2 Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3 Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4 Pemantauan program, yaitu dimana kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan menurut Henry, Bryant dan White (dalam Istiqomah, 2017:18) yaitu :

- 1 Waktu pencapaian.
- 2 Tingkat pengaruh yang diinginkan.
- 3 Perubahan perilaku masyarakat.
- 4 Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.
- 5 Tingkat kesadaran masyarakat atau kemampuan dirinya.

2.2.1.7. Indikator Efektivitas

Adapun indikator dari efektivitas menurut Makmur (2011:7-9) dalam tulisan Mingkid,2017:3-4), yaitu :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Dengan ketepatan dalam pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga nantinya dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

5. Ketepatan Berfikir

Ketepatan berfikir dapat melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dan dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Champhelell J.P. (dalam Lestana,2016:373) adapun pengukuran efektivitas secara umum dan menonjol, yaitu :

1 Keberhasilan Program

2 Keberhasilan Sasaran

- 3 Kepuasan Terhadap Program
- 4 Tingkat Input dan Output
- 5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

2.2.2. Pembangunan

2.2.2.1. Definisi Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (dalam tulisan Suryono,2010:2:46) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, Negara dan Pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan tersebut mengandung makna : (1) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (2) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar yang dilaksanakan secara terus menerus, (3) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (4) pembangunan mengarah kepada modernitas, (5) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Adapun menurut Katz (dalam tulisan Suryono, 2010:3) pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain.

Menurut Rogers (dalam tulisan Suryono,2010:3) bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Pembangunan menurut Bryant dan White (dalam Suryono,2010:2) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki 5 (lima) implikasi utama yaitu : (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok, (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan, (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan, (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri, (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu kepada Negara lainnya.

2.2.2.2. Unsur-Unsur Pembangunan

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pembangunan (dalam Suryono,2010:4) yaitu :

1. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang untuk menuju kesempurnaan.
2. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh dan untuk rakyat menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
3. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

2.2.2.3. Tipe-Tipe Pembangunan

Menurut Tjokrowinoto (dalam tulisan Suryono,2010:47-48) bahwa terdapat 9 (sembilan) tipe pembangunan, yaitu :

1. Tipe Ideal (ideal type), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem.
2. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (short run pay of), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengebdalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem.
3. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (long run pay of), dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan.
4. Tipe kegagalan (failure), dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem.

5. Tipe dorongan lingkungan (environmental stimulus), dengan ciri yang lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan.
6. Tipe Pragmatis (pragmatisme), dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.
7. Tipe Krisis (crisis), dimana tipe dengan ciri yang lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem.
8. Tipe masyarakat statis (static society), dengan ciri yang mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan maupun perubahan sistem.
9. Tipe Chaos, ditandai dengan fenomena masyarakat yang kebingungan, percecokan, kemarahan, banyak halangan dan jalan ditempat.

2.2.2.4. Konsep Pembangunan

Tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting (dalam tulisan Suryono,2010:53-) yakni :

1. Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, yang diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun stidak-tidaknya mengandung 4 arti : (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam

yang arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologis, aspek perilaku dan aspek bentuk).

2. Secara Ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep :

1. Konsep Pertumbuhan (growth), adalah konsep ekonomi, lengkap ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan Nasional nyata jangka panjang waktu tertentu. Rostow dalam *The Stages Of Economic Growth* membentangkan teorinya yang terkenal tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari : Tahap masyarakat tradisional, Tahap transisional, Tahap tinggal landas dan Tahap pematapan (pedewasaan) serta Tahap konsumsi masa tinggi.
2. Konsep Rekonstruksi Ekonomi, adalah upaya pada peningkatan secara luas, melainkan yang lebih dititik beratkan pada upaya membangun kembali perekonomian suatu negara.
3. Konsep Modernisasi, adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industry di Inggris.
4. Konsep Westernisasi, adalah analog modernisasi, dimana hal ini adalah sebagai upaya pembangunan untuk menandingi Barat atau minimal mencapai taraf hidup yang relative sama dengan yang terdapat didunia Barat.

5. Konsep Perubahan Sosial, dimana diartikan sebagai perubahan kelembagaan masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial, dan perilaku kelompok.
6. Konsep Pembebasan, yang mengajarkan bahwa pembangunan bermakna sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan baik secara kelompok maupun individu.
7. Konsep Pembaruan, merupakan salah satu diantara bentuk proses sosial yang erat berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial.
8. Konsep Pembangunan Bangsa, merupakan salah satu dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja, tetapi juga pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan serta hubungan antar bangsa.
9. Konsep Pembangunan Nasional, konsep ini merupakan dimana tekad untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya atau setidaknya tekad untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional diatas kepentingan lainnya.
10. Konsep Pengembangan, sering dikaitkan dengan istilah negara yang sedang berkembang. Berdasarkan pendekatan antropologis negara ini dianalogkan dengan kondisi masyarakat primitive yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana.

11. Konsep Pembinaan, merupakan proses pembongkaran pola pikir lama yang dianggap keliru, yang selama itu mengendalikan diri bagi yang bersangkutan. Upaya ini dapat disebut semacam cuci gudang intelektual.
12. Konsep Pembangunan, dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.
13. Konsep Pembangunan Nasional Indonesia, sebagai model analisis menunjukkan bahwa pembangunan Nasional Indonesia merupakan amanat konstitusi Undang-undang Dasar dan GBHN yang didalamnya tertuang tentang cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Dengan demikian secara metodologis aspek-aspek penting yang tersurat dan tersirat dalam pembangunan nasional Indonesia setidaknya-tidaknya memiliki ideologi pembangunan (Pancasila), hakekat pembangunan (Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia) dan strategi pembangunan (Trilogi pembangunan: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial).

2.2.2.5. Pergeseran Paradigma Pembangunan

Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya menjadi *self projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan-kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Namun, karena pengalaman suatu bangsa yang mempengaruhi

kesadaran tersebut tidaklah statis, maka interpretasi mereka tentang pembangunan tidak pula statis. Melalui mata rantai pemutusan dan demistifikasi paradigma pembangunan, maka terjadilah pergeseran-pergeseran paradigma tadi. Paradigma pembangunan yang pada suatu waktu tertentu menjadi acuan pembangunan Nasional dapat mengalami proses demistifikasi, sementara paradigma-paradigma baru timbul menggantikannya.

Melalui prose itu, maka timbullah pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma non-ekonomi, paradigma dependensia sampai paradigma pembangunan manusia. Berikut disajikan beberapa pergeseran paradigma pembangunan, antara lain :

1. Paradigma Pertumbuhan, dimulai pada sekitar dasa warsa 1960-an, banyak Negara-negara dunia ketiga meniru atau mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital Nasional, dengan GNP sebagai ukuran keberhasilannya. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi Negara Dunia Ketiga dapat terpecahkan. Melalui pendekatan ini, memang pada akhirnya banyak Negara berkembang terbukti berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapitanya, namun keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan yang tinggi, telah membawa berbagai dampak negatif. Dimana Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan

deteriorisasi ekologis penyusutan sumber daya alam dan timbulnya kesenjangan sosial serta dipensiasi.

2. Paradigma pertumbuhan dengan pemerataan, menyadari kegagalan paradigma pertumbuhan, maka pendekatan pembangunan di Negara berkembang kemudian bergeser pada *growth with distribution* dengan strategi utama “*employment-oriented deveploment*”. *Growth with distribution paradigm* digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang apabila digunakan secara tersendiri atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan tersebut, antara lain : (1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efesien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat, (2) mengalihkan investasi kegolongan-golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya, (3) mendistribusikan pendapatan konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung, (4) pengalihan harta yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin misalnya melalui land reform. Yang dimana focus strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan, kelompok sasaran dari pendekatan ini yang diinginkan oleh Bank Dunia adalah 40% penduduk negara miskin. Namun pendekatan ini pada akhirnya memang juga terbukti gagal, karena “*World Employment*

strategies” yang dikenakan oleh ILO lebih bersifat “*comprehensive employment strategies*” dengan yang bersifat “*capital intensive*” sehingga hanya orang-orang yang berpendidikan dan berketerampilan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan.

3. Paradigma Teknologi Teat Guna, kegagalan dari teknologi yang “*capital intensive*” dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagian besar penduduk dunia ketiga, telah memicu lahirnya pendekatan baru yang disebut “*appropriate technology*” atau teknologi teat guna. Filosofi dari pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Misi dari teknologi tepat guna ini adalah menurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan dinamika dan kreativitas masyarakat berfikir dan bekerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu dan menerima perubahan dan pembaharuan teknologi dan melatih sikap mandiri. Namun demikian, pendekatan ini pun pada akhirnya dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial dan special. Hal ini disebabkan antara lain, keterbatasan pengembangan teknologi teat guna di Negara-negara sedang berkembang yaitu : (1) tidak ada institusi yang secara khusus bertugas untuk

mengembangkan teknologi teat guna, (b) selisih harga yang cukup dasar antara teknologi impor dengan menciptakan teknologi baru, (c) sistem nilai yang tidak mendukung.

4. Paradigma Kebutuhan Dasar, orang pertama yang menganjurkan kebutuhan dasar adalah Mahbub ul Haq dari Bank Dunia. Dimana Haq menyebutkan pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Paradigma ini lahir karena adanya kekecewaan yang makin besar terhadap pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) yang semakin rendah dan atas pengurangan kemiskinan dibanyak Negara-negara berkembang. Dimana konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksudkan tidak hanya terbatas hanya pada pangan, pakaian dan papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, transport, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, pendekatan yang dikonsepskan bukan hanya pendekatan "*central planning*" melainkan lebih bersifat "*community deveploment*". Pada tahun 1976 Bank Dunia merasa perlu untuk mendefinisikan situasi ekonomi internasional kedalam kebijaksanaan baru yang disebut sebagai "*recapture the momentum of economic growth*". Setahun kemudian, konsep Bank Dunia mengenai problem utara-selatan ini menjadi pendekatan baru yang pelaksanaannya diserahkan kepada Willy Brandt. Dampak dari dibentuknya komisi Willy Brandt tersebut, telah ditelantarkannya pendekatan "*basic need strategy*" oleh mereka yang

sebelumnya terlibat didalamnya. Pada akhir 1970-an “*basic need strategy*” telah dianggap “kenangan masa lampau” dengan catatan-catatan besar yang menekankan pentingnya pembangunan dipedesaan, namun tidak ada satupun hasil yang didapatkan.

5. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, ide dari konsep “*sustainable development*” bermula dari *The Club of Rome* pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para menejer para ahli ilmu teknik dan ilmuwan se-Eropa. *Sustainability*, diartikan sebagai “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang”. Dimana Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang. Melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
6. Paradigma Pemberdayaan, konsep *empowerment* (pemberdayaan) yang dibidani oleh Friedman, muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksudkan adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasuki nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

2.2.2.6. Studi Pendekatan Pembangunan

Pendekatan utama studi pembangunan (dalam Suryono,2010:37-41) dapat dibagi dalam dua wilayah pengembangan asumsi filosofis, yakni pemikiran konservatif (*soft science*) dan pemikiran radikal (*hard science*). Batasan dari dua wilayah pemikiran tersebut dapat dipakai sebagai dasar referensi pengembangan model ekuilibrium dan model konflik.

Asumsi dasar dari teori ekuilibrium antara lain menyebutkan :

1. Behavioral Theory (teori perilaku) memiliki asumsi dasar bahwa penderitaan individu akan hilang dengan adanya determinan kontekstual. Perilaku dapat berubah setiap saat. Peristiwa pembangunan akan terjadi melalui pengalaman-pengalaman belajar baru. Konsep-konsep yang digunakan antara lain : *Modernisation, Learning curves, Internalization, Deprivation attitudes* (perubahan sikap), *values, Rationality, Adult Socialization* (sosialisasi usia dewasa), *Intra generational change* (perubahan dalam generasi).
2. *Psycho Dynamic Theory*, memiliki asumsi dasar bahwa awal sosialisasi anak akan menentukan masa dewasanya. Perilaku selanjutnya mungkin akan terjadi pertentangan inovasi antar perilaku individu dan lingkungan sosialnya. Proses pembangunan banyak ditentukan oleh faktor pribadi (*personality*) dan bukan hanya faktor modal. Konsep yang dipergunakan antara lain : *personality,*

backwardness (tinjauan masa lalu), *childhood experiences* (pengalaman masa kecil), *status withdrawal* (penarikan kembali status), *inter generational change* (perubahan dalam generasi), *modernization*.

3. *Diffusionist Theory*, mencoba menyederhanakan pemikiran yang sifatnya mendua dalam perkembangan sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pembangunan akan terjadi melalui pembentukan kapital baru dan kekuatan teknologi. Diffusionisme ini dapat berbentuk diffusi cultural (ide dan institusi), diffuse sosio-psychologi (jiwa wiraswasta) dan diffusi ekonomi (dari pertumbuhan sektor ekonomi kuat/ekspansif ke sektor ekonomi primer dan sektor-sektor lainnya). Konsep yang dipergunakan, antara lain : *diffusion curves*, *rates of change for ecological unit*, *lagging sectors* (sektor yang lemah), *productivity*, *technological growth*, *modernization*.

Adapun asumsi dasar teori konflik antara lain menyebutkan :

1. *Structuralist Non-Marxist Theory*, memiliki asumsi dasar bahwa tidak mungkin untuk meramalkan sejarah yang akan datang. Setiap revolusi akan membangkitkan pergolakan kebutuhan dari pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi pembangunan melalui pembatasan-pembatasan untuk menghilangkan konflik kelas dalam masyarakat. Konsep-konsep yang dipergunakan, antara lain : *pluralism*, *conflict*, *conflict management*, *strata*, *means* (alat), *ends* (tujuan), *institutional reform* (pembaharuan kelembagaan), *power*, *structural dualism*, *structural change*.

2. *Marxist Theory/ Neo Clasical Political Economist Theory*, menyatakan bahwa model atau cara memproduksi mempengaruhi tindakan ekonomi dan struktur klas dalam masyarakat. Tahap pembentukan klas sosial yang berbeda tergantung hubungan kelompok dengan alat-alat produksi.

2.2.2.7. Indikator Pembangunan

Menurut Arif Budiman (dalam Yudhi,2016:374-375) ada 4 cara mengukur pembangunan, yaitu :

1. Kekayaan Rata-rata, pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Dimana sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara-negara tersebut setiap tahunnya.
2. Pemerataan, segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh bangsa yang tidak berarti, bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam Negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk didalam kemiskinan.
3. Kualitas kehidupan, salah satu cara mengukur kesejahteraan penduduk sebuah Negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality Of Life Index), yang mengukur tiga indikator, yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf.

4. Kerusakan Lingkungan, sebuah Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin.
5. Keadilan Sosial Kesenambungan, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya member tekanan pada tingkat produktivitas ekonomin sebuah Negara, kini menjadi semakin kompleks.

2.2.3. Dana Desa

2.2.3.1. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. (dalam tulisan Chasana, 2017:17).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, pemgunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

2.2.2.1. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (dalam tulisan Kusmana,2018:83) yaitu :

1. Untuk membiayai pembangunan desa.
2. Untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa.
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
5. Untuk tunjangan aparat desa.
6. Untuk operasional pemerintahan desa.
7. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

2.2.2.2. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Selain itu, menurut Sahdan, dkk ((2003:23) dalam tulisan Kusmana, 2018:84-85) dalam pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni :

1. Partisipatif

Sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan dan pemuda atau sebagainya.

2. Transparan

Yang artinya semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel

Artinya keseluruhan proses penggunaan dana desa, mulai dari usulan peruntukkan, pelaksanaannya sampai dengan pencapaiannya hasil dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kestaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.2.2.3. Penetapan Prioritas Dana Desa

Adapun ketentuan penetapan prioritas penggunaan dana desa (dalam tulisan Sujadi,2018:34-35) yaitu :

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan segala kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus dipastikan kemanfaatanya untuk:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin didesa, warga penyandang disabilitas dan marginal.

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai dana desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

1. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan pendidikan warga desa yang lebih diutamakan.
 2. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga desa lebih diutamakan, dan
 3. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.
2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang desa yang memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dimana adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka penemuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara ;

1. Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat desa lebih diutamakan, dibandingkan dengan kegiatan yang tidak atau yang lebih sedikit didukung masyarakat desa.

2. Kegiatan direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat desa.
3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
Tujuan pembangunan desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus memiliki rencana pengelolaan dan manfaatnya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa.
4. Prioritas Berdasarkan Kepastian Adanya Pengawasan
Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dimana pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga Masyarakat desa harus memiliki peluang untuk mengawasi penggunaan dana desa. oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus dipublikasikan kepada masyarakat diruang publik atau diruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
5. Prioritas Berdasarkan Sumber Daya dan Tipologi Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa, yang dimana dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong.

Perencanaan kegiatan desa dapat mempertimbangkan Tipologi desa. tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, ataupun keadaan yang berkembang dan berubah yang diharapkan akan terjadi dimasa depan.

2.2.2.5. Mekanisme Penetapan Dana Desa

Selain itu, dalam penetapan penggunaan dana desa tentunya ada mekanisme yang perlu diperhatikan (Sujadi,2018:36-38) yaitu :

1. Tahap Musyawarah Desa

Dimna Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif dan demokratis serta transparan. Dimana pembahasan prioritas penggunaan dana desa dalam musyawarah desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa terkait prioritas penggunaan dana desa harus diruangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana desa yang termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait dengan penggunaan dana desa, pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. Pagu indikatif Kepala Desa
2. Data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan pagu indikatif dana desa beserta data IDM, Kepala Desa untuk merancang prioritas penggunaan dana desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

1. Kemanfaatn hasil kegiatan
2. Usulan dan aspirasi masyarakat desa serta peran masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pengelolaan dan pemanfaatan dari hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya.
4. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan.

5. Pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh desa.
6. Tipologi desa untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibiayai oleh dana desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di desa.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Dimana Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa tentang Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat desa. rancangan RKP desa, termasuk juga rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana desa yang harus dibahas dan juga disepakati dalam musrembang desa. Hasil kesepakatan dalam musrembang desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2.2.4. Desa

2.2.4.1. Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 (dalam tulisan Munir, 2017:11) desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah.

Dalam Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa (dalam Mingkid,2017:4) bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono,2006:9) dalam Mingkid, 2017:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya menurut Dwipayana,dkk (2004:11) dalam Hendrik, 2013: 465) bahwa desa adalah “suatu wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat”, menjadi rumusan yang berbunyi“desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa” sehingga secara

sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

2.2.4.2. Unsur-unsur Desa

Menurut Ndraha (dalam Hendrik,2013:465) unsur-unsur desa yaitu :

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
2. Tanah pusaka dan kekayaan desa.
3. Sumber-sumber kekayaan desa.
4. Unsur-unsur rumah tangga.
5. Pemerintahan desa memegang fungsi mengatur.
6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

2.2.4.3. Klasifikasi Desa

Pada era orde baru, terdapat empat pengklasifikasian desa (dalam tulisan Munir, 2017:85-87) antara lain :

1. Pra Desa (Desa Tradisional), tipe desa semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil. Tipe desa ini cenderung bersifat sporadis dan sementara. Pra desa dicirikan oleh (a) sangat tradisional, tradisi

dan adat istiadat berlaku ketat dan mengikat, (b) hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar sangat erat, (c) pola permukiman bersifat sporadis.

2. Desa Swadaya, desa ini memiliki kondisi yang relatif statis dan tradisional. Dimana dalam artian masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Desa swadaya ini dicirikan oleh: (a) sifatnya masih tradisional, adat istiadatnya masih sangat mengikat dan dijadikan panutan dalam aspek kehidupan, (b) hubungan antar manusianya sangat erat, (c) pengawasan sosial didasarkan atas kekeluargaan, (d) mata pencaharian penduduk pada sektor primer dan (e) teknologi sangat sederhana, produktivitas rendah dan keadaan prasarana desa masih langka dan sederhana.
3. Desa Swakarya, keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh unsur – unsur dari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Desa swakarya ini dicirikan oleh: (a) mata pencaharian penduduk disektor sekunder mulai bergerak dibidang kerajinan dan industry kecil seperti pengelolaan hasil, (b) dimana hasil produksi desa dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industry kecil serta perdagangan dan jasa berada pada tingkat sedang, (c) adat istiadat dan budaya mengalami transisi dan pemerintahan desa mulai berkembang dengan baik, (d) pendidikan dan keterampilan penduduk sekitar 60% yang telah menamatkan pendidikan Sekolah dasar, (e) Swadaya gontongroyong tumbuh

atas kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat, (f) prasarana memadai, baik kuantitas maupun kualitas.

4. Desa Swasembada, masyarakat desa ini telah maju, sudah mengenal mekanisme pertanian, mulai menggunakan cara-cara ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma-norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Desa Swasembada dicirikan oleh :
 - (a) mata pencaharian disektor tersier yaitu sebagian besar penduduk bekerja dibidang industry dan jasa, (b) adat istiadat dan budaya berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai khas loka, (c) pendidikan dan keterampilan penduduk sudah cukup tinggi, (d) kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif dan pembangunan pedesaan direncanakan dengan baik, (e) prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai, (f) gotong royong sudah manifest, berdasarkan musyawarah warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Selain itu, pengklasifikasian desa dimunculkan kembali dengan menggunakan indikator-indikator yang telah konkret dan analisis lebih objektif. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) (dalam tulisan Munir, 2017:88-90), antara lain :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada, adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

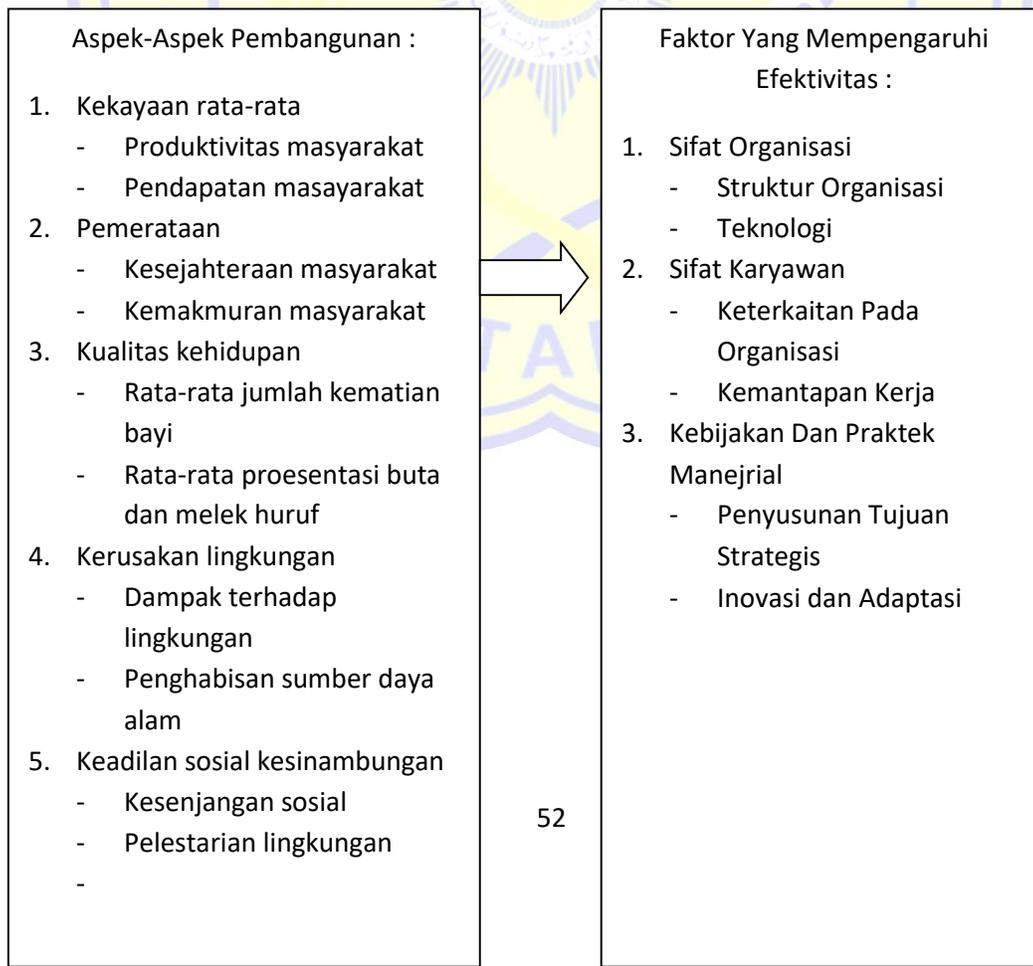
2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Sembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan teknologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan menagulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya, adalah desa yang memiliki potensial desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal atau disebut Desa Pra Medya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa sangat Tertinggal atau disebut Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2.3. Kerangka Berfikir

Seperti yang diketahui bahwa Strees merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori Efektivitas. Menurutnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu sifat organisasi, sifat lingkungan, sifat karyawan dan kebijakan dan praktek manejrial. Jika salah satu dari keempat faktor ini mempengaruhi efektivitas maka dikatakan belum efektif. Selain teori efektivitas yang memiliki faktor yang mempengaruhi, maka disisi lain konsep pembangunan memiliki indikator untuk mengukur keberhasilannya. Seperti yang disebutkan oleh Arief Budiman, bahwa adapun aspek dari pembangunan terdiri atas kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan dan keadilan sosial yang berkesinambungan. Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu saling berkaitan antara teori efktivitas dengan teori pembangunan. Dimana efektivitas ini nantinya akan mempengaruhi hasil pembangunan yang dilaksanakan, sebaliknya jika efektivitas memenuhi kategori yang sudah ditetapkan maka proses pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil.

2.4. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4. Kerangka berfikir peneliti



2.3.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya dilapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanyamasih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Untuk itu, dalam memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, adalah :

1. Efektivitas

Richard M. Steers mengajukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam efektivitas pencapaian suatu tujuan atau program yaitu, sifat organisasi, sifat lingkungan, sifat karyawan dan kebijakan dan praktek manejrial.

2. Pembangunan

Arief Budiman mengemukakan pendapat bahwa terdapat 5 aspek sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan antara lain; (1) Kekayaan rata-rata, (2)

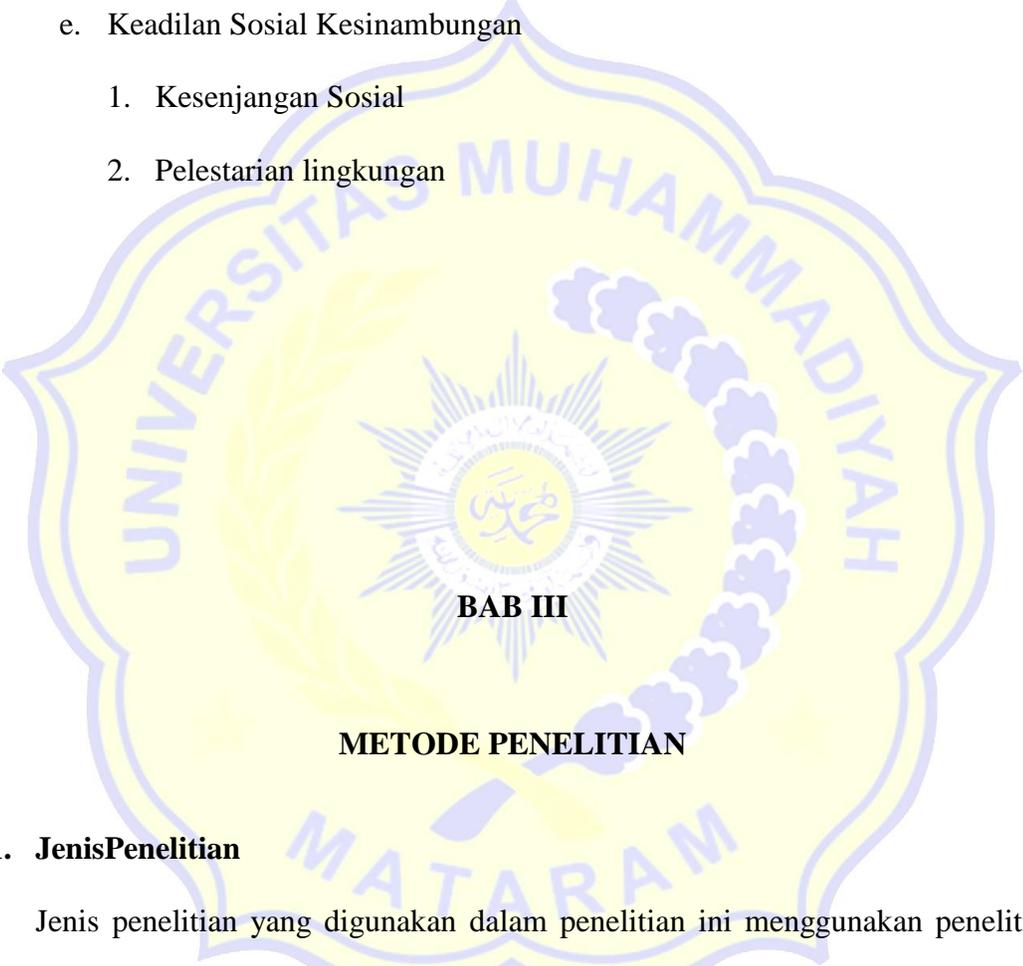
Pemerataan, (3) Kualitas kehidupan, (4) Kerusakan lingkungan, (5) Keadilan sosial kesinambungan. Kelima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan.

2.3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berfikir peneliti, yaitu :

1. Aspek – Aspek Pembangunan
 - a. Kekayaan Rata
 1. Produktivitas Masyarakat
 2. Pendapatan masyarakat
 - b. Pemerataan
 1. Kesejahteraan Masyarakat
 2. Kemakmuran masyarakat
 - c. Kualitas Hidup
 1. Rata-rata jumlah kematian bayi

2. Rata-rata persentasi buta dan melek huruf
- d. Kerusakan Lingkungan
1. Dampak terhadap lingkungan
 2. Penghabisan sumber daya alam
- e. Keadilan Sosial Kestinambungan
1. Kesenjangan Sosial
 2. Pelestarian lingkungan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kaulitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Juranalas tahun 2019. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat dan pendukung pelaksanaan program tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Juranalas. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Aalas yang mendapatkan kucuran dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 di desa Juranalas dan mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Juranalas tahun 2019.

3.4. Teknik Penentu Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik *Purposive Sampling*, dimana penelitian dilakukan dengan krtiretia yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Hamid Patilama, 2013). Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa atau Aparatur Desa.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Masyarakat.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung

pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau efektivitas pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, Daftar nprogram pembangunan desa, catatan peneliti dilapangan, foto-foto pelaksanaan pembangunan desa serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun tehnik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi. Observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan sukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono. 2018)

b. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal lain dari informan yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life Histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2018).

3.7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Milles dan Huberman (Sugiyono, 2018) tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut diantaranya yakni:

a. Pengumpulan Data

Peneliti akan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara di lapangan. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang sudah terkumpul dapat ringkas atau rangkuman yang akan dianalisis dan dijadikan sebagai data penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang kemudian dilakukan penggolongan kedalam dua bagian yaitu: Kepala Desa atau Aparatur Desa dalam memutuskan pelaksanaan program pembangunan dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara data-data yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan permasalahan penelitian tidak dimasukkan dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan serta tabel. Penyajian ini memberi kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.